

Bali–NTB–NTT Teken PKS Regional Merajut Kembali Persaudaraan Sunda Kecil, KADIN NTT Siap Gas Misi Dagang

Labuan Bajo, nwartapedia.com – Pemerintah Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) regional bertajuk “Merajut Kembali Persaudaraan Sunda Kecil”, Rabu (28/1/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung ITDC The Golo Mori, Kabupaten Manggarai Barat, Labuan Bajo.

Penandatanganan PKS ini menjadi tonggak penting penguatan sinergi antartiga provinsi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan timur Indonesia melalui kolaborasi lintas sektor.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. (Cand) Bobby Lianto, M.M., MBA., hadir langsung dalam kegiatan tersebut bersama Ketua APINDO NTT Bobby Pitoby serta Wakil Ketua Umum Bidang Hukum KADIN NTT, Francisco Bessie.

Acara ini turut dihadiri berbagai asosiasi dunia usaha, di antaranya HIPMI NTT, ASITA, PHRI, HPI, dan APTRINDO, sebagai bentuk dukungan konkret terhadap kerja sama regional yang diinisiasi oleh Gubernur Bali, Gubernur NTB, dan Gubernur NTT.

Dalam keterangannya, Bobby Lianto menyampaikan apresiasi atas langkah strategis ketiga kepala daerah tersebut yang

dinilai visioner dan berpihak pada penguatan ekonomi regional.

Ia menegaskan bahwa KADIN NTT mendukung penuh implementasi PKS ini dan siap bergerak cepat melalui berbagai program konkret, salah satunya pelaksanaan misi dagang lintas provinsi.

“KADIN NTT akan melakukan misi dagang ke Bali dan NTB, dan sebaliknya pengusaha dari Bali dan NTB juga akan datang ke NTT. Ini menjadi titik awal pengenalan antardaerah sekaligus ajang memperkenalkan potensi unggulan masing-masing wilayah,” ujar Bobby.

Menurutnya, dalam dunia usaha, kehadiran langsung pelaku bisnis ke daerah tujuan sangat penting untuk melihat, mendengar, dan memahami potensi yang ada secara nyata. Dengan cara itu, peluang dan naluri dagang akan tumbuh secara alami.

Ke depan, kata Bobby, berbagai konsep kerja sama akan dirumuskan secara lebih terstruktur agar mampu saling menguatkan antarwilayah Bali, NTB, dan NTT.

Ia juga berharap adanya kebijakan-kebijakan khusus antardaerah yang mampu membuka peluang bisnis baru, baik di sektor perdagangan maupun pengembangan industri hilirisasi.

Saat ini, KADIN NTT telah menjalin komunikasi intensif dengan KADIN Bali dan KADIN NTB, termasuk penjajakan kerja sama suplai pohon sengan dari Pulau Sumba, Flores, dan Timor untuk memenuhi kebutuhan industri tripleks di Lombok.

Selain sektor industri, kolaborasi di bidang pariwisata juga tengah dikembangkan, seperti penguatan paket wisata berbasis sea tourism menggunakan kapal pinisi maupun kapal antarpulau yang menghubungkan Bali, Lombok, dan Labuan Bajo.

“Berbagai bentuk kerja sama lainnya akan terus kami

kembangkan, dimulai dengan misi dagang untuk memetakan kebutuhan dan potensi masing-masing daerah,” tambahnya.

Adapun lima pilar utama yang menjadi fokus dalam PKS regional ini meliputi:

Konektivitas dan transportasi udara, laut, dan darat

Pariwisata dan ekonomi kreatif

Energi terbarukan

Perdagangan dan ekspor

Perencanaan pembangunan yang bersinergi

Melalui kerja sama ini, Bobby Lianto berharap ketergantungan ekonomi kawasan terhadap Pulau Jawa dapat dikurangi. Sinergi antartiga provinsi diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan saling menguntungkan.

“Setiap daerah memiliki keunggulan strategis. NTT bukan hanya Labuan Bajo, tetapi juga Pulau Timor yang memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang selatan menuju Timor Leste dan Australia,” pungkasnya. ***

Pemkot Kupang Matangkan Aksi Konvergensi 2026, Tegaskan Ketepatan Data dan Anggaran Penanganan Stunting

Kupang, [nwartapedia.com](https://www.nwartapedia.com) – Pemerintah Kota Kupang terus memperkuat komitmennya dalam percepatan penurunan stunting

melalui Rapat Reviu Aksi Konvergensi Stunting Tahun 2026 yang melibatkan seluruh perangkat daerah terkait.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Plt. Kepala Bappeda Kota Kupang, Wildrian R. Otta, S.STP, MM, sebagai langkah strategis memastikan kualitas data dan ketepatan penganggaran intervensi stunting.

Rapat ini dihadiri oleh perwakilan Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas PUPR, Dinas Dukcapil, Dinas Sosial, dan Dinas Kominfo, serta para operator perangkat daerah yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Aksi Konvergensi.

Plt. Kepala Bappeda Kota Kupang, Wildrian R. Otta, menjelaskan bahwa rapat reviu ini merupakan kelanjutan dari proses konsolidasi data sebelumnya yang melibatkan seluruh kecamatan dan kepala puskesmas se-Kota Kupang.

“Ini merupakan tindak lanjut dari konsolidasi bersama camat dan kepala puskesmas. Dalam waktu lima hari, seluruh data berhasil diinput berkat kerja sama yang solid antara camat, kepala puskesmas, serta para operator puskesmas, PLKB, dan setcam,” ungkapnya.

Pada tahapan reviu ini, perhatian utama diarahkan pada pemastian kualitas, kelengkapan indikator, serta penandaan anggaran pada seluruh tahapan Aksi Konvergensi Stunting Tahun Berjalan 2026, yang merupakan bagian dari Tahapan Aksi 3a, yaitu Penguatan Pelaksanaan Penandaan Anggaran.

Hingga rapat berlangsung, Data Sasaran, Data Pendukung, serta Data Capaian Layanan Semester I dan II telah selesai diinput.

Sementara itu, data Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Akta Kelahiran masih dalam tahap penyempurnaan dan ditargetkan rampung pada hari yang sama.

Sebanyak empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah melakukan penginputan penandaan anggaran, baik untuk tahun berjalan maupun tahun rencana 2025–2026, yaitu Dinas Kesehatan, Dinas P2KB, Dinas PUPR, dan Dinas Ketahanan Pangan. OPD lainnya tetap memegang peran strategis dalam mendukung Aksi Konvergensi, seperti Dinas Sosial melalui penyediaan data PBI APBN, Dinas Dukcapil dalam pemenuhan data Akta Kelahiran dan KIA, serta Dinas Kominfo yang mendukung publikasi seluruh rangkaian kegiatan.

Bappeda Kota Kupang menetapkan batas waktu dua hari untuk penyelesaian penandaan anggaran tahun berjalan dan tahun rencana, dengan tenggat akhir 31 Januari, sesuai dengan Surat Edaran Kemendagri Nomor 400.4.2/0807/Bangda.

Dalam pembahasan teknis, disepakati bahwa satu kegiatan tidak dapat diinput dengan dua sumber pendanaan berbeda.

Dinas Kesehatan sebagai OPD dengan jumlah input terbanyak menyampaikan kendala pada satu sub-kegiatan dan satu indikator yang memiliki variasi sumber pendanaan.

Solusi yang disepakati adalah pemberian catatan khusus pada tahapan penandaan anggaran sub-kegiatan tersebut untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bina Bangda Kemendagri.

Seluruh hasil penginputan ini akan menjadi dasar monitoring dan evaluasi di tingkat kota, sekaligus bahan Pra-Musrenbang Tematik Stunting dan Musrenbang Tingkat Kecamatan yang direncanakan akan dihadiri oleh Wali Kota Kupang.

Pemerintah Kota Kupang menegaskan bahwa akurasi data, konsistensi penganggaran, dan disiplin waktu menjadi faktor kunci agar intervensi penanganan stunting benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. ***

Kota Kupang Raih Penghargaan UHC Awards 2026 Kategori Pratama

Kupang, nwartapedia.com – Komitmen Pemerintah Kota Kupang dalam menjamin hak dasar kesehatan warganya kembali mendapat pengakuan di tingkat nasional.

Kota Kupang resmi menerima Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Awards Tahun 2026 kategori Pratama, atas keberhasilannya memperluas akses layanan kesehatan yang mudah, cepat, dan inklusif bagi masyarakat.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, dari BPJS Kesehatan pada acara yang digelar di Jakarta, Selasa (27/1).

Penghargaan diserahkan oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Abdul Muhaimin Iskandar, didampingi Menteri Kesehatan RI, Wakil Menteri Dalam Negeri, Direktur Utama BPJS Kesehatan, serta Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan.

Capaian ini menempatkan Kota Kupang sebagai salah satu pemerintah daerah yang dinilai progresif dan konsisten dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Hingga tahun 2026, kepesertaan UHC di Kota Kupang tercatat mencapai 115 persen, melampaui standar minimal nasional yang ditetapkan pemerintah pusat.

Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, menegaskan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama dan

keberpihakan kebijakan kepada rakyat.

“Penghargaan ini bukan tentang pemerintah, tetapi tentang hak masyarakat Kota Kupang untuk hidup sehat tanpa dibebani biaya dan prosedur yang rumit. Prinsip kami sederhana: jangan biarkan satu pun warga menunda berobat hanya karena tidak punya uang atau terkendala administrasi,” tegasnya.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Kupang memandang kesehatan sebagai fondasi utama pembangunan manusia.

“Kesehatan bukan privilese, tetapi hak dasar. Kalau rakyat sehat, mereka bisa bekerja, belajar, dan berdaya. Itulah inti pembangunan yang ingin kami dorong di Kota Kupang,” ujarnya.

Dalam sambutannya, Menko Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa jaminan kesehatan merupakan instrumen penting dalam pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

“Masyarakat tanpa jaminan kesehatan sangat rentan terjebak dalam kemiskinan. JKN hadir sebagai proteksi. Negara telah hadir sebagai enabling state yang membebaskan rakyat dari beban finansial kesehatan dan membuka ruang untuk hidup lebih produktif dan berdaya,” katanya.

Ia menilai pencapaian UHC oleh pemerintah daerah bukan sekadar capaian administratif, melainkan investasi strategis jangka panjang dalam mencegah kemiskinan akibat biaya kesehatan, sekaligus wujud nyata pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Gufron Mukti, menyebut Indonesia sebagai salah satu negara dengan pencapaian UHC tercepat di dunia.

“Dalam waktu sekitar sepuluh tahun, Indonesia mampu mencapai UHC. Ini capaian luar biasa dan menjadi rujukan

internasional. Banyak negara dan universitas dunia belajar dari sistem JKN kita,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa UHC Awards 2026 diberikan kepada pemerintah daerah berdasarkan indikator cakupan kepesertaan, tingkat keaktifan peserta, serta kepatuhan pembayaran iuran.

Di sisi lain, Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, drg. Retnowati, mengungkapkan bahwa salah satu faktor kunci keberhasilan Kota Kupang adalah penerapan UHC Non Cut-Off.

Melalui skema ini, warga yang membutuhkan layanan kesehatan darurat tetap dapat dilayani meskipun status kepesertaan BPJS Kesehatannya nonaktif.

“Pengaktifan kepesertaan bisa dilakukan dalam waktu 1×24 jam hingga 3×24 jam. Warga cukup menunjukkan KTP, dan seluruh pembiayaan ditanggung BPJS Kesehatan,” jelasnya.

Ia menambahkan, keberhasilan tersebut merupakan hasil kolaborasi pembiayaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah mencakup lebih dari 80 persen populasi sasaran.

Program ini juga terbukti efektif dalam penanganan cepat warga terdampak bencana, seperti kejadian di Belo beberapa waktu lalu, serta memberikan fleksibilitas bagi warga dari daerah sekitar, termasuk Kabupaten Kupang, yang memanfaatkan fasilitas kesehatan di Kota Kupang. ***

Ratusan Kepala Daerah Terima

UHC Awards 2026, Cakupan JKN Tembus 98 Persen Penduduk Indonesia

Jakarta, nwartapedia.com – Komitmen pemerintah daerah dalam menjamin perlindungan kesehatan masyarakat kembali mendapat pengakuan nasional. Sebanyak 31 pemerintah provinsi serta 397 pemerintah kabupaten dan kota menerima penghargaan pada ajang Universal Health Coverage (UHC) Awards Tahun 2026 yang diselenggarakan BPJS Kesehatan, Selasa (27/1).

Penghargaan tersebut diberikan kepada para kepala daerah yang dinilai berhasil mendorong perluasan dan keberlanjutan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sehingga masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang adil dan merata.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menegaskan bahwa capaian UHC merupakan hasil sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjamin hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan.

“Hingga 31 Desember 2025, kepesertaan Program JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa, atau lebih dari 98 persen total penduduk Indonesia, dengan tingkat kepesertaan aktif sebesar 81,45 persen. Angka ini melampaui target nasional RPJMN 2025–2029,” ujar Ghufron.

Ia menyebutkan, peran kepala daerah sangat krusial, terutama dalam memastikan masyarakat terdaftar sebagai peserta JKN serta menjaga keberlangsungan kepesertaan aktif melalui dukungan kebijakan dan penganggaran daerah.

Sejalan dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, Indonesia menempatkan Universal Health Coverage sebagai indikator utama pembangunan kesehatan. Program JKN

menjadi instrumen strategis dalam pencapaian target SDGs 3.8, yakni cakupan kesehatan semesta bagi seluruh penduduk.

Ghufron menambahkan, dampak UHC tidak hanya dirasakan pada meningkatnya akses layanan kesehatan, tetapi juga berkontribusi pada penguatan kesejahteraan sosial.

Penelitian LPEM FEB UI tahun 2025 menunjukkan bahwa daerah yang telah mencapai UHC memiliki tingkat kesakitan lebih rendah, akses layanan lebih baik, serta penurunan beban pengeluaran kesehatan rumah tangga.

Peningkatan cakupan kepesertaan juga mendorong pemanfaatan layanan kesehatan secara signifikan. Saat ini, rata-rata kunjungan peserta JKN ke fasilitas kesehatan mencapai sekitar dua juta kunjungan per hari, mencerminkan terbukanya akses layanan kesehatan bagi masyarakat luas.

Untuk menjaga mutu pelayanan, BPJS Kesehatan terus memperkuat kerja sama dengan fasilitas kesehatan, mengoptimalkan layanan primer, serta memperluas pemanfaatan teknologi digital.

Berbagai kanal layanan non-tatap muka telah dikembangkan, seperti Aplikasi Mobile JKN, PANDAWA melalui WhatsApp 08118165165, dan Care Center 165.

“Peserta juga dapat memanfaatkan antrean online dan fitur i-Care JKN yang memungkinkan tenaga medis melihat riwayat pelayanan peserta hingga satu tahun terakhir, sehingga pelayanan dapat diberikan lebih cepat dan tepat,” jelas Ghufron.

Sebagai bentuk apresiasi, UHC Awards 2026 diberikan kepada kepala daerah dalam kategori Utama, Madya, dan Pratama. Penghargaan ini diharapkan menjadi pemacu bagi daerah yang belum mencapai UHC untuk mempercepat perluasan perlindungan kesehatan melalui Program JKN.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menegaskan bahwa Program JKN merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

“Program JKN memastikan masyarakat tidak jatuh miskin karena sakit. Dengan masyarakat yang sehat, akan tercipta bangsa yang makmur, sejahtera, dan berdaya saing,” kata Cak Imin.

Ia menargetkan cakupan kepesertaan JKN mencapai 99 persen penduduk pada tahun 2029 dan menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan kepesertaan sekaligus meningkatkan kualitas layanan kesehatan.

Pemberian UHC Awards 2026 diharapkan menjadi pemicu bagi seluruh daerah untuk mempercepat pencapaian Universal Health Coverage, demi mewujudkan Indonesia yang semakin sehat dan sejahtera. ***

Ngopi Sore Penuh Makna: Hangatnya Audiensi PWI NTT dan BRI Kupang Bahas HPN 2026

Kupang, [nwartapedia.com](https://www.nwartapedia.com) – Senja belum sepenuhnya turun ketika suasana hangat terasa di ruang pertemuan Kantor Cabang BRI Kupang, Senin (26/1/2026) sore. Jarum jam menunjukkan pukul 16.30 WITA.

Di ruangan itu, bukan sekadar rapat formal yang berlangsung, melainkan obrolan akrab penuh makna antara insan pers dan perbankan, membahas satu agenda besar: Hari Pers Nasional (HPN) 2026.

Selama kurang lebih satu jam, hingga pukul 17.30 WITA, jajaran pengurus Persatuan Wartawan Indonesia Nusa Tenggara Timur (PWI NTT) duduk berdampingan dengan pimpinan BRI Cabang Kupang.

Diskusi mengalir santai, sesekali diselingi senyum dan tawa ringan, mencairkan suasana sekaligus menegaskan eratnya komunikasi dua institusi yang sama-sama berperan dalam pembangunan daerah.

Rombongan PWI NTT diterima langsung oleh Kepala BRI Cabang Kupang, Terry S.M Tambun, di Kantor BRI Cabang Kupang, Jalan Percetakan Cendana No.6, Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang.

Audiensi diawali oleh Sekretaris PWI NTT, Aloysius Tani, yang membuka pertemuan dengan memperkenalkan jajaran pengurus sekaligus menyampaikan maksud kedatangan PWI NTT.

“Kami datang bersilaturahmi sekaligus ingin membangun komunikasi yang baik dengan BRI, terutama dalam rangka menyukseskan Hari Pers Nasional 2026 di NTT,” ujar Aloysius dengan nada bersahabat.

Pembicaraan kemudian menghangat saat Ketua Panitia HPN 2026 NTT, Ryan Nong, memaparkan gambaran besar pelaksanaan HPN 2026. Ia menjelaskan bahwa meskipun peringatan HPN 2026 secara nasional akan dipusatkan di Serang, Banten, namun di tingkat Provinsi NTT, berbagai rangkaian kegiatan akan dipusatkan di Kota Kupang.

“Tahun ini tema HPN adalah Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat. Karena itu, kami ingin menggandeng BRI agar kegiatan HPN juga menyentuh langsung aspek ekonomi masyarakat,” tutur Ryan.

Ia menyebutkan sejumlah agenda yang direncanakan, mulai dari aksi kebersihan lingkungan, donor darah, hingga diskusi publik bertema ekonomi.

“Untuk diskusi publik, kami ingin menghadirkan Gubernur sebagai keynote speaker, serta pihak perbankan. Ini penting agar masyarakat mendapatkan edukasi ekonomi dan perbankan secara langsung,” jelasnya.

Tak hanya itu, Ryan juga menekankan pentingnya kolaborasi nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat, salah satunya dengan melibatkan UMKM binaan BRI.

“Kalau UMKM binaan BRI dilibatkan, maka manfaat HPN bisa benar-benar dirasakan masyarakat, bukan hanya seremonial,” tambahnya.

Menanggapi berbagai gagasan tersebut, Kepala BRI Cabang Kupang, Terry S.M Tambun, menyampaikan apresiasinya.

Ia menegaskan bahwa BRI pada prinsipnya sangat terbuka untuk mendukung HPN 2026 di NTT.

“Kami siap memberikan dukungan, termasuk dari sisi pembiayaan, meskipun tentu masih perlu kami diskusikan secara internal,” ungkap Terry.

Ia juga menyatakan kesiapannya untuk melibatkan UMKM binaan BRI dalam rangkaian kegiatan HPN 2026, sekaligus menekankan pentingnya sinergi antara perbankan dan media.

“Saya cukup memahami teman-teman media. Kolaborasi ini penting karena kami juga membutuhkan publikasi dari insan pers,” katanya lugas.

Menurut Terry, edukasi perbankan kepada masyarakat juga perlu dikemas dengan pendekatan yang sederhana dan membumi.

“Edukasi perbankan itu penting, tapi bahasanya harus ringan supaya mudah dipahami semua kalangan,” ujarnya.

Audiensi tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Panitia HPN Edy Nahak serta anggota Panitia HPN 2026 NTT, Tari Rahmانيar.

Pertemuan sore itu pun ditutup dengan kesepakatan untuk terus melanjutkan komunikasi dan menyusun bentuk kerja sama konkret demi menyukseskan HPN 2026 di Nusa Tenggara Timur.

Di tengah senja Kupang yang kian meredup, pertemuan itu meninggalkan satu pesan terang: kolaborasi yang dibangun dengan kehangatan dan keterbukaan akan melahirkan kerja sama yang bermakna bagi masyarakat. ***

Perumda Air Minum Kota Kupang Teguhkan Komitmen Pelayanan Lewat Penandatanganan Pakta Integritas

Kupang, nwartapedia.com – Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Kupang kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penandatanganan Pakta Integritas oleh 81 pegawai, Selasa (27/1/2026).

Kegiatan ini menjadi agenda rutin tahunan yang dilaksanakan setiap awal tahun sebagai wujud keseriusan perusahaan dalam membangun tata kelola yang profesional, transparan, dan berintegritas.

Penandatanganan Pakta Integritas tersebut merupakan langkah strategis Perumda Air Minum Kota Kupang dalam memastikan seluruh pegawai bekerja sesuai dengan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan dedikasi tinggi dalam melayani masyarakat Kota Kupang.

Kepala Satuan Pengawas Internal (SPI) Perumda Air Minum Kota Kupang, Robert Marius Seran, menyampaikan bahwa Pakta Integritas bukan sekadar dokumen administratif, melainkan komitmen moral dan profesional seluruh pegawai dalam menjalankan tugas selama satu tahun ke depan.

“Pakta Integritas ini menjadi pengingat dan pengikat bagi seluruh pegawai agar tetap konsisten menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab demi pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ungkap Robert.

Sebanyak 81 pegawai secara resmi membubuhkan tanda tangan Pakta Integritas di atas meterai. Dokumen tersebut dibuat rangkap dua, di mana satu salinan dipegang oleh masing-masing pegawai dan satu salinan lainnya disimpan sebagai arsip perusahaan untuk kepentingan evaluasi, monitoring, dan pengawasan kinerja.



Direktur Perumda Air Minum Kota Kupang, Isidorus Lilijawa, dalam sambutannya menegaskan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam membangun pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

“Integritas berasal dari kata integer yang berarti utuh. Pegawai yang berintegritas adalah mereka yang konsisten antara perkataan dan perbuatan. Apa yang kita ucapkan, itulah yang kita lakukan,” tegas Isidorus.

Ia mengajak seluruh pegawai untuk menjadikan Pakta

Integritas sebagai pedoman kerja dalam mewujudkan pelayanan yang cepat, efektif, dan efisien kepada pelanggan.

Menurutnya, pelayanan yang berintegritas akan berdampak langsung pada kepercayaan dan kepuasan masyarakat.

Lebih lanjut dijelaskan, Pakta Integritas tersebut memuat sejumlah poin penting, antara lain komitmen pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), penghindaran benturan kepentingan, peningkatan kualitas pelayanan publik, akuntabilitas terhadap pengawasan dan audit, serta penerapan sanksi bagi setiap pelanggaran.

“Saya berharap kegiatan ini menjadi momentum baru dan semangat baru bagi seluruh pegawai untuk terus meningkatkan dedikasi dan pengabdian, sehingga Perumda Air Minum Kota Kupang semakin dipercaya, diterima, dan dicintai oleh masyarakat Kota Kupang,” tutup Isidorus. (MI)

Lurah Pasir Panjang Usulkan Air Lubang Pasir Panjang Ditetapkan sebagai Cagar Budaya

Kupang, nwartapedia.com –

Sebuah sumber air alami yang berada di Kelurahan Pasir Panjang, Kota Kupang, kini diusulkan untuk dicatat dan ditetapkan sebagai cagar budaya.

Sumber air yang dikenal warga sebagai Air Lubang Pasir Panjang itu terletak tepat di belakang Kantor Lurah Pasir

Panjang, RT 08 RW 03.

Lurah Pasir Panjang, Robert Octavianus, S.Sos, menyampaikan bahwa sumber air tersebut memiliki nilai sejarah, budaya, dan kearifan lokal yang kuat.

Menurutnya, air lubang ini telah digunakan masyarakat sejak zaman dahulu dan masih dimanfaatkan hingga sekarang.

“Air lubang ini bukan sekadar sumber air biasa. Ia sudah ada sejak dulu dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Pasir Panjang. Karena itu, saya minta agar air ini dicatat dan dijadikan cagar budaya agar tetap terjaga dan tidak rusak,” ujar Robert.

Salah satu warga setempat, Adriana Makatita (72), menuturkan bahwa air tersebut telah ada sejak masa leluhurnya.

Ia mengingat jelas bagaimana air lubang ini selalu digunakan untuk mandi dan mencuci oleh warga sekitar.

“Sejak dulu, sejak orang tua dan oyang saya masih ada, air ini sudah ada. Dari dulu sampai sekarang air ini tetap dipakai,” ungkap Adriana.

Adriana juga menceritakan berbagai pengalaman unik yang dipercaya warga berkaitan dengan air tersebut. Menurutnya, air lubang ini tidak boleh dibawa keluar dari lokasi.

“Dulu pernah ada kejadian, anak-anak ambil air lalu dibawa pulang, setelah itu sakit dan tidak bisa bicara. Selain itu, air ini juga pernah disedot pakai mesin, tapi tidak pernah naik,” tambahnya.

Secara fisik, Air Lubang Pasir Panjang memiliki keunikan tersendiri. Airnya tampak jernih dan berada di dalam lubang batu dengan kedalaman sekitar 8 meter dari permukaan tanah.

Kejernihan dan kestabilan air ini membuatnya sejak dahulu menjadi harapan utama warga sebagai sumber air baku,

khususnya untuk mandi dan mencuci warga di sekitar lokasi.

Hal senada disampaikan Tonci Makatita (46). Ia mengatakan bahwa meski rasa airnya agak payau, air tersebut tetap digunakan warga untuk kebutuhan sehari-hari.

“Air ini biasa dipakai untuk mandi dan cuci. Rasanya memang sedikit payau, tapi dari dulu air ini jadi andalan warga,” katanya.

Dengan nilai sejarah, kepercayaan lokal, dan fungsi sosial yang masih hidup hingga kini, Air Lubang Pasir Panjang dinilai layak untuk dilindungi sebagai warisan budaya.

Warga berharap, dengan penetapan sebagai cagar budaya, sumber air ini dapat dijaga kelestariannya dan diwariskan kepada generasi mendatang.

(goe)

Dinas P dan K Kota Kupang Data Objek Diduga Cagar Budaya Selama Lima Hari

Kupang, [nwartapedia.com](https://www.nwartapedia.com) – Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), melaksanakan kegiatan pendataan terhadap objek-objek yang diduga sebagai cagar budaya di seluruh wilayah Kota Kupang.

Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung selama lima hari, terhitung sejak Senin, 26 hingga Jumat, 30 Januari 2026.

Pendataan tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi dan

mendokumentasikan berbagai objek yang memiliki nilai sejarah, budaya, serta kearifan lokal yang berpotensi ditetapkan sebagai cagar budaya. Dalam pelaksanaannya, tim pendata mencatat setiap objek berdasarkan format dan kriteria yang telah ditetapkan.

Kepala Bidang Kebudayaan Dinas P dan K Kota Kupang, Serlin Marlis Tiro, S.STP., MM, menjelaskan bahwa hasil pendataan di lapangan akan menjadi bahan awal untuk dilakukan kajian lebih lanjut oleh tim ahli.

“Pendataan ini merupakan tahap awal. Setelah selesai, seluruh data akan kami serahkan kepada tim ahli untuk dikaji secara akademik. Selanjutnya, hasil kajian tersebut akan disampaikan kepada Pemerintah Kota Kupang untuk diterbitkan Surat Keputusan (SK) penetapan objek sebagai cagar budaya,” jelas Serlin.

Ia menambahkan, pada tahap pendataan ini tim menargetkan sebanyak 16 objek yang akan dicatat dan didokumentasikan, sesuai dengan informasi yang diperoleh dari masyarakat.

Meski demikian, jumlah tersebut masih berpotensi bertambah apabila di lapangan ditemukan objek lain yang memenuhi kriteria sebagai cagar budaya.

Sementara itu, salah satu anggota tim pendata, Goris Takene, SE, menegaskan pentingnya dukungan dari masyarakat serta pemerintah kelurahan selama proses pendataan berlangsung.

“Kami berharap masyarakat dan aparat kelurahan dapat berperan aktif. Apabila mengetahui atau menemukan titik-titik objek yang memiliki nilai sejarah dan layak dijadikan cagar budaya, kami mohon untuk diinformasikan kepada tim,” ujarnya.

Menurut Goris, partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan agar proses pendataan dapat berjalan maksimal dan menyeluruh. Dengan demikian, warisan budaya yang dimiliki

Kota Kupang dapat terlindungi dan dilestarikan untuk generasi mendatang.

Kegiatan pendataan ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam upaya pelestarian cagar budaya sekaligus memperkuat identitas sejarah dan budaya Kota Kupang.

(goe)

Ketua MUI Kota Kupang Minta Pembangunan Masjid Darul Amanah Liliba Dihentikan Sementara

Kupang, nwartapedia.com – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Kupang, H. Muhammad MS, menghimbau seluruh pengurus dan jemaah Masjid Darul Amanah Liliba, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, untuk menghentikan sementara seluruh aktivitas pembangunan masjid.

Imbauan ini disampaikan sambil menunggu rampungnya proses perizinan resmi dari pemerintah setempat.

Selain soal perizinan, Muhammad MS juga menekankan pentingnya pendekatan persuasif kepada masyarakat sekitar guna memperoleh dukungan bersama serta menjaga harmonisasi sosial di lingkungan setempat.

“Sebelum pembangunan, sosialisasi kepada warga setempat sebenarnya sudah dilakukan dan pengurusan izin sudah berjalan hingga tahun keenam. Namun, pembangunan tempat ibadah memang sering menimbulkan pro dan kontra, sehingga

kami harus turun langsung ke lokasi untuk memastikan kebenaran informasi,” ujar H. Muhammad MS kepada media ini, Minggu (25/1/2026).

Ia menjelaskan, persoalan utama yang muncul saat ini adalah pembangunan masjid telah berjalan meskipun izin resmi belum diterbitkan, kondisi yang dinilainya jelas bertentangan dengan aturan yang berlaku.

“Pembangunan masjid memang bisa menimbulkan pro dan kontra. Kita tidak bisa hanya mendengar satu pihak saja, sehingga perlu turun langsung ke lapangan untuk memeriksa kebenaran informasi yang ada,” ungkapnya.

Sebelumnya, warga RT 38/RW 14 Kelurahan Liliba juga telah melakukan audiensi dengan Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, pada Jumat (23/1/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota menegaskan bahwa Pemerintah Kota Kupang tidak menolak pembangunan Masjid Darul Amanah, namun menekankan agar seluruh proses pembangunan dilakukan sesuai dengan regulasi dan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan adanya arahan dari MUI Kota Kupang dan pemerintah daerah, diharapkan pengurus Masjid Darul Amanah Liliba dapat menghentikan sementara aktivitas pembangunan, melakukan koordinasi serta komunikasi intensif dengan warga sekitar, sambil menunggu proses perizinan resmi selesai. ***

Pemkot Kupang Hibahkan Aset

untuk BNN, Perangkat Melawan Narkoba Kian Diperkuat

Kupang, nwartapedia.com – Pemerintah Kota Kupang kembali menunjukkan dukungan nyata terhadap lembaga negara yang berada di garis depan pemberantasan narkoba.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penghibahan aset daerah kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Kupang sebagai upaya memperkuat perang melawan narkoba di wilayah tersebut.

Tidak hanya sebatas dukungan aset, Pemerintah Kota Kupang juga membuka ruang kolaborasi yang lebih luas ke depan.

Bentuk kerja sama tersebut meliputi dukungan program pencegahan narkoba di lingkungan pendidikan serta rencana pelaksanaan tes urin bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari upaya membangun birokrasi yang bersih, sehat, dan berintegritas.

Kepala BNN Kota Kupang, Kombes Pol. Nelson Filipe Dias Quintas, S.I.K., M.H., menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas komitmen Wali Kota Kupang yang dinilainya berhasil memecahkan persoalan yang telah berlangsung sangat lama.

“Kalau dihitung, ini hampir 15 tahun. Saya masuk Kota Kupang tahun 2016, sejak masih berpangkat Mayor, sampai sekarang sudah Kombes Pol, baru hari ini beres. Ini kebahagiaan besar bagi kami,” ungkap Nelson.

Menurut Nelson, langkah yang diambil Wali Kota Kupang merupakan wujud goodwill dan kepemimpinan yang tegas dalam mendukung tugas lembaga negara.

Ia menegaskan bahwa persoalan yang selama ini berlarut-larut sejatinya dapat diselesaikan apabila ada niat baik dan

komitmen bersama.

“Kami ini instansi negara. Kantor sudah ada, asetnya jelas. Tidak ada yang sulit kalau ada niat baik. Hari ini kami merasakan langsung komitmen itu,” tambahnya.

Diketahui, tanah yang dihibahkan kepada BNN Kota Kupang berlokasi di Jalan R.A. Kartini Nomor 1, Kelurahan Kelapa Lima, dengan luas 1.314 meter persegi.

Aset tersebut sebelumnya merupakan barang milik daerah Pemerintah Kota Kupang.

Proses hibah telah melalui tahapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hingga akhirnya ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Kupang Tahun 2025.

Hibah ini diharapkan dapat semakin memperkuat peran BNN Kota Kupang dalam menjalankan tugas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba secara berkelanjutan. ***